Pemetaan Potensi dan Tantangan: Analisis SWOT Pencapaian Target SDGs sebagai Fondasi Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kawasan Teluk Tomini (Studi Kasus di Kabupaten Tojo Una-Una)

Penulis

WRASTAWA RIDWAN, ST., MT.

DR. FUNCO TANIPU, ST., MA.

ILYAS HUSAIN, S.PD., M.PD

KATA PENGANTAR

Dengan rasa hormat dan kebanggaan yang mendalam, kami dengan senang hati mempersembahkan buku ini kepada Anda. Buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam menjelajahi dan menganalisis upaya pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai fondasi penting dalam pengembangan Kawasan Ekonomi di Kawasan Teluk Tomini.

Hasil penelitian tahap I telah terdapat baseline data pencapaian target SDGs di 11 daerah yang berada di kawasan Teluk Tomini, dari baseline data tersebut terdapat indikator SDGs dari 17 goals SDGs yang belum mencapai target nasional dan daerah berdasarkan metadata SDGs Edisi II terutama untuk kategori C (lebih dari seperempat jalan menuju target SDGs), D (kurang dari seperempat jalan menuju target SDGs), dan E (masih jauh dari pencapaian target SDGs). Sebagai tindak lanjut dari penelitian tahap 1 ini adalah perlunya analisis lanjutan untuk mengetahui permasalahan atau kelemahan dan tantangan setiap daerah lokasi penelitian dalam pencapaian target SDGs.

Dalam era di mana keberlanjutan telah menjadi landasan utama bagi pertumbuhan dan kemajuan, pembahasan mengenai pencapaian SDGs merupakan langkah yang tak terelakkan. Kawasan Teluk Tomini, dengan segala potensi dan tantangannya, menjadi fokus utama dalam eksplorasi ini. Dari aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan, buku ini mengajak Anda untuk menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana pencapaian target SDGs menjadi kunci dalam merancang dan mengembangkan kawasan ekonomi yang berkelanjutan.

Analisis kepentingan menjadi landasan penting dalam pemaparan ini. Kami tidak hanya menggali tentang apa yang telah dicapai, tetapi juga menguraikan mengapa pencapaian tersebut memiliki nilai yang mendalam bagi kawasan ini secara keseluruhan. Dengan memberikan gambaran komprehensif tentang kepentingan di balik setiap langkah, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih jernih dan memperkuat tekad untuk mewujudkan perubahan yang positif.

Kami tidak dapat cukup menekankan pentingnya peran Anda sebagai pembaca dalam perjalanan ini. Dari setiap halaman yang dibaca hingga gagasan yang dipertimbangkan, Anda secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan itikad baik dan semangat kolaboratif, kami yakin kita dapat merintis jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi Kawasan Teluk Tomini.

Akhir kata, izinkanlah kami untuk menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta kepada Anda, pembaca yang setia, yang telah memilih untuk bergabung dalam perjalanan ini. Semoga buku ini memberikan wawasan yang berharga dan menjadi sumber inspirasi bagi upaya kita bersama dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdaya tahan di Kawasan Teluk Tomini.

Gorontalo, April 2024

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GAMBAR 7
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 Latar Belakang 9
BAB II KABUPATEN TOJO UNA-UNA 13
BAB III HASIL PENELITIAN SDGS TAHAP 1 17
3.1 Pilar Sosial 17
3.1.1 Goals 1 (Menghapus Kemiskinan) 17
3.1.2 Goals 2 (Mengakhiri Kelaparan) 24
3.1.3 Goals 3 (Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan) 25
3.1.4 Goals 4 (Pendidikan Berkualitas) 25
3.1.5 Goals 5 (Kesetaraan Gender) 27
3.2 Pilar Ekonomi 27
3.2.1 Goals 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) 27
3.2.2 Goals 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi) 28
3.2.3 Goals 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur) 30
3.2.4 Goals 10 (Berkurangnya Kesenjangan) 32
3.2.5 Goals 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan) 34
3.3 Pilar Lingkungan 34
3.3.1 Goals 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak) 35
3.3.2 Goals 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) 35
3.3.3 Goals 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggungjawab) 36
3.3.4 Goals 13 (Penanganan Perubahan Iklim) 37
3.3.5 Goals 14 (Ekosistem Lautan) 38
3.3.6 Goals 15 (Ekosistem Daratan) 38
3.4 Pilar Hukum & Tata Kelola 39
3.5 Hasil Pemetaan Kategori Capaian Indikator SDGs Kabupaten Tojo Una-Una 41
BAB IV ANALISIS HIERARCHY PROCESS 46
4.1 pemetaan prioritas berdasarkan analisis AHP 46

4.2 Rekomendasi 51
BAB V IMPORTANT PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) 53
5.1 Pemetaan Prioritas Menggunakan Importance Performance Analysis (IPA)..... 53
5.2 Rekomendasi 54
BAB IV PENUTUP 56
6.1 Kesimpulan..... 56
6.2 Saran..... 56
DAFTAR PUSTAKA..... 59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indikator Pilar Sosial 41
Tabel 4.2 Indikator Pilar Ekonomi 42
Tabel 4.3 Indikator Pilar Lingkungan 44
Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Berpasangan 47
Tabel 4.5 Penjumlahan Matriks 47
Tabel 4.6 Normalisasi Matriks 48
Tabel 4.7 Bobot Prioritas 49
Tabel 4.8 Perkalian setiap nilai cell dengan bobot prioritas 49
Tabel 4.9 Hasil Penjumlahan Setiap Baris 49
Tabel 4.10 Hasil Penjumlahan Baris Dibagi Dengan Elemen Prioritas Baris 50
Tabel 4.11 Nilai Indeks Random 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Tojo Una-Una..... 13
Gambar 2.2 Luas wilayah (km2) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah..... 14
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tojo Una-Una, Maret 2012 – Maret 2022 15
Gambar 4.1 Hasil Pemetaan Indikator dan Capaian 25
Gambar 4.2 Kondisi Ketercapaian Indikator 2.2.1 25
Gambar 4.3 Proporsi Penduduk Yang Hidup Dibawah Median Pendapatan Tahun 2017-2021... 33
Gambar 4.4 Hierarki Pemilihan Keputusan 46
Gambar 4.5 Diagram Kartesian 53

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable development goals* (SDGs) merupakan agenda negara-negara dunia yang ditetapkan pada bulan September 2015, di Sidang Umum PBB untuk menjadi agenda Global 2030 dan harus dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia, termasuk oleh Indonesia. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, dengan prinsip universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan.

Untuk itu Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs harus disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi. Untuk menyusun Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut telah disusun pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di daerah sehingga dihasilkan rencana aksi TPB/SDGs yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Ini artinya bahwa dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) maka dibutuhkan berbagai analisis secara ilmiah yang dapat membantu pemerintah dalam menentukan arah rencana aksi yang tepat sasaran dalam mencapai target dan indikator dari 17 *goals* SDGs.

SDGs sebagai komitmen internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Adapun 17 *goals* SDGs baik secara global maupun nasional yang tertuang dalam Perpres No.59 Tahun 2017 adalah; 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 10) berkurangnya kesenjangan; 11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) penanganan perubahan iklim; 14) ekosistem lautan; 15) ekosistem daratan; 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan metadata SDGs yang diterbitkan oleh kementerian PPN/Bappenas edisi 2 Tahun 2020 bahwa 17 *goals* SDGs memiliki 124 target dan 289 indikator yang dikelompokan dalam 4

(empat) pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Keempat pilar ini tidak terpisahkan dalam rumusan RAD SDGs provinsi sehingga perlu kajian kesiapan dan arah aksi daerah untuk mengimplementasikan program berbasis SDGs. Analisis setiap pilar pembangunan menjadi landasan untuk memotret data yang mengindikasikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan setiap daerah yang searah dengan RPJMN 2020-2024. Adapun empat dokumen pilar SDGs yaitu;

1. Pilar Pembangunan Sosial. Pilar ini terdiri dari 5 goals yaitu *goals* 1, 2, 3, 4, 5 tentang: 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; dan 5) kesetaraan gender.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi. Pilar ini meliputi 5 goals yaitu *goal* 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau; *goal* 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; goal 9 tentang industri, inovasi dan infrastruktur; goal 10 tentang berkurangnya kesenjangan; dan goal 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan. Pilar ini meliputi 6 goals yaitu goal 6 tentang air bersih dan sanitasi layak, goal 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, goal 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, goal 13 tentang penanganan perubahan iklim, goal 14 tentang ekosistem lautan, dan 15 tentang ekosistem daratan.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang meliputi satu goal yaitu goal 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Analisis setiap pilar pembangunan didasarkan pada metadata yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) edisi II pada Tahun 2020. Metadata ini menjadi panduan seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kawasan Teluk Tomini sehingga memiliki sistem evaluasi yang sama untuk mengukur kesiapan dan juga ketercepaian setiap daerah dalam pencapaian target dan indikator SDGs di daerah dan nasional.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan definisi *International Hydrographic Organization* (IHO) bahwa Teluk Tomini merupakan salah satu perairan Kepulauan Hindia Timur dengan batas timurnya adalah batas Barat Laut Maluku yakni Tanjung Pasir Panjang dan Tanjung Tombalilatu. Teluk ini berada di Pulau Sulawesi dengan luas sekitar ± 6.000.000 Ha, dilewati garis katulistiwa serta berada pada garis

Wallace-Weber dengan sifat perairan tergolong perairan semi tertutup (*semi enclosed*) yang bersinggungan langsung dengan tiga provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo.

Posisi geografis ini menjadikan Kawsan Teluk Tomini memiliki kekayaan flora dan fauna beraneka ragam baik di darat maupun di laut. Oleh karena itu teluk ini dikenal sebagai bagian segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle*) yang juga memiliki Taman Nasional Laut di Kepulauan Togean sebagai *"the Heart of Coral Triangle*" yang menjadi kawasan wisata yang setiap saat ramai dikunjungi wisatawan asing. Bahkan UNESCO menetapkan bahwa Teluk Tomini sebagai sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dilindungi, dan pemerintah Indonesia menetapkan bahwa ekosistem Teluk Tomini merupakan salah satu 26 kawasan andalan laut nasional yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat melimpah. Untuk itu pada Tahun 2003, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kawasan Teluk Tomini sebagai gerbang Mina Bahari.

Namun bonus potensi kekayaan alam yang sangat melimpah dan strategis di tiga provinsi dan bahkan dengan Maluku Utara ini ternyata belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di berbagai sektor di kawasan Teluk Tomini. Seharusnya kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam di kawasan Teluk Tomini menjadi potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan tanpa meninggalkan budaya dan kearifan lokal. Untuk itu pada Tahun 2008, pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Percepatan Daerah telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Teluk Tomini.

Upaya percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Teluk Tomini, ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan di kawasan ini hingga di bawah 10 %. Hal ini dibuktikan dengan data BPS tentang angka kemiskinan di tahun 2022, di mana dari 10 provinsi termiskin ternyata 2 provinsi terdapat di kawasan Teluk Tomini yaitu Provinsi Gorontalo peringkat ke-5 (15,51%) dan Provinsi Sulawesi Tengah peringkat ke-9 (12,30 %) sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Meskipun demikian dari jumlah penduduk yang termiskin justru terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sekitar 387,71 ribu jiwa dibandingkan Provinsi Gorontalo yaitu sekitar 187,35 ribu jiwa pada September 2022. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki angka kemiskinan di bawah 10 % yaitu sekitar 7,34% di bulan

September 2022, namun jumlah penduduk miskin tidak berbeda jauh dengan Provinsi Gorontalo yaitu sekitar 187,33 ribu jiwa.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian UNG sebagai salah satu universitas yang unggul di Kawasan Teluk Tomini untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di kawasan Teluk Tomini sebagai program unggulan yang perlu didukung dengan strategi perencanaan yang berbasis data *sustainable development goals* (SDGs). Program unggulan UNG ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional Indonesia yang menyelaraskan capaian pembangunan dengan 17 tujuan SDGs demi mewujudkan kesejahteran masyarakat yang berkelanjutan yang dipertegas dengan PERPRES No. 59 Tahun 2017 dan lebih dipertegas lagi dengan PERPRES NO. 111 Tahun 2022. Perpres ini menegaskan bahwa dalam kerangka pembangunan nasional harus dan mutlak mengintegrasikan indikator SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional daerah. Ini artinya bahwa upaya pengembangan kawasan ekonomi khusus di kawasan Teluk Tomini seperti di Kabupaten Tojo Una-Una perlu didukung dengan langkah strategi yang sinergi dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD pemerintah Kabupaten Tojo Una-una

Oleh karena itu salah satu langkah yang ditempuh oleh UNG adalah melakukan penelitian yang fokus untuk memetakan baseline data pencapaian target SDGs di kawasan Teluk Tomini untuk 4 pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Temuan hasil penelitian ini dapat memberikan landasan bagi UNG untuk dapat menyusun desain strategis pengembangan kawasan ekonomi di Teluk Tomini yang searah dengan target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu manfaat bagi pemerintah daerah adalah menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan yang strategis sesuai isu potensi daerah demi menghapus kemiskinan sekaligus untuk mewujudkan masyarakat sejahtera seperti yang ditargetkan SDGs.

Hasil penelitian tahap I telah terdapat baseline data pencapaian target SDGs di 11 daerah yang berada di kawasan Teluk Tomini. Namun dari baseline data tersebut terdapat indikator SDGs dari 17 goals SDGs yang belum mencapai target nasional dan daerah berdasarkan metadata SDGs Edisi II terutama untuk kategori C (lebih dari seperempat jalan menuju target SDGs), D (kurang dari seperempat jalan menuju target SDGs), dan E (masih jauh dari pencapaian target SDGs). Sebagai tindak lanjut dari penelitian tahap 1 ini adalah perlunya *analysis SWOT* untuk mengetahui permasalahan atau kelemahan dan tantangan setiap daerah lokasi penelitian dalam pencapaian

target SDGs. Disamping itu permasalahan dan tantangan, setiap daerah pasti memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dipetakan sebagai kekuatan dan peluang untuk pencapaian target-target SDGs baik pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan maupun hukum dan tata kelola. Oleh karena itu dalam penelitian tahap ke-2 ini difokuskan pada analisis SWOT pencapaian target SDGs sesuai dengan dengan indikator SDGs yang masih kategori C, D dan E. Dengan demikian temuan ini juga menjadi salah satu referensi bagi pemerintah untuk merumuskan strategi pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) atau IKU yang dirumuskan sesuai kondisi daerah masing-masing.

BAB II KABUPATEN TOJO UNA-UNA

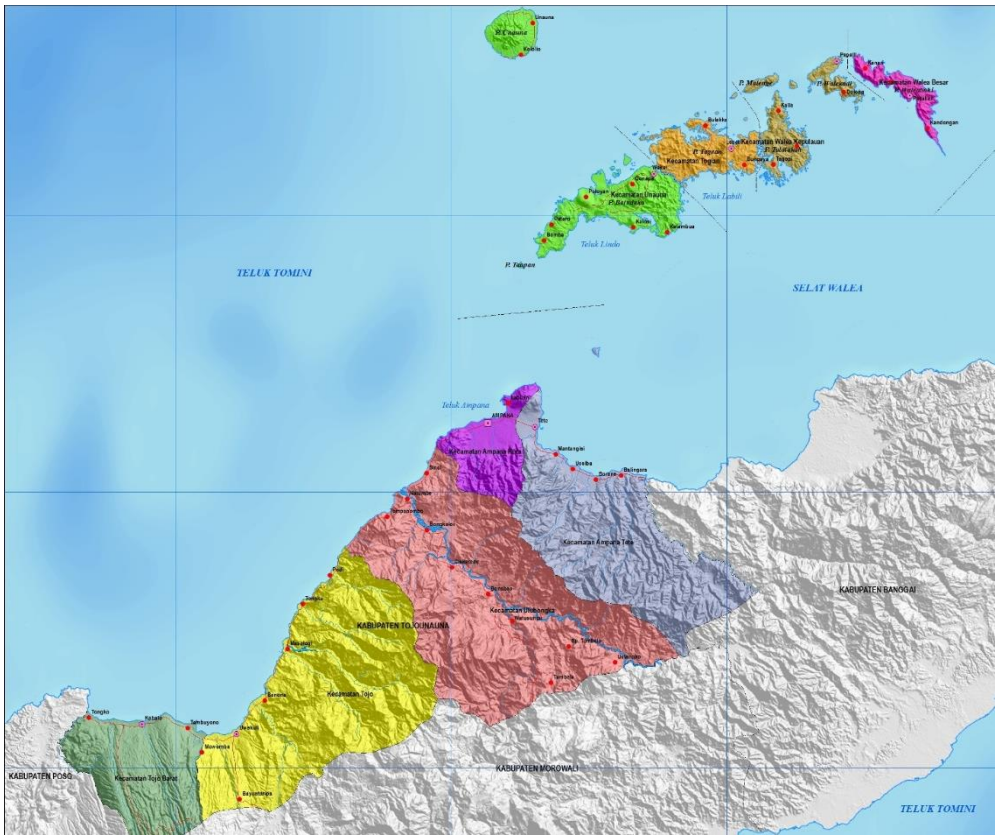

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Tojo Una-Una

Kawasan Teluk Tomini merupakan salah satu teluk besar di Indonesia dengan potensi alam yang melimpah. Teluk ini berada di antara tiga provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo yang seharusnya menjadi kawasan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera secara berkesinambungan. Bahkan pada Tahun 2003 teluk ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Mina Bahari dan selanjutnya pada Tahun 2008 diluncurkan program percepatan pembangunan kawasan Teluk Tomini secara berkelanjutan. Posisi geografis Teluk Tomini yang berada di garis katuliswa dan sekaligus berada di Zona Wallacea ini menyimpan keindahan dan potensi alam yang unik dan sangat melimpah baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

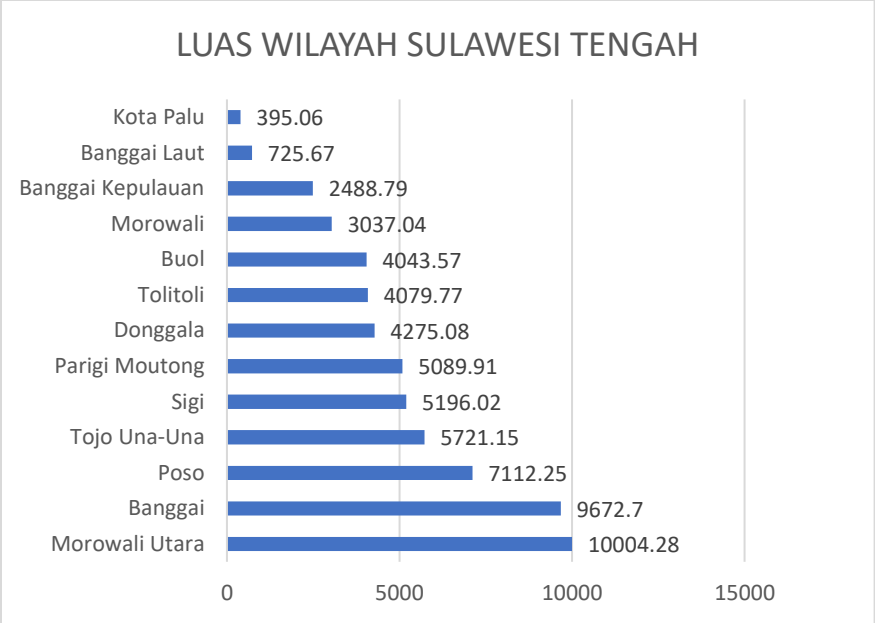

Gambar 2.2 Luas wilayah (km2) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

(Sumber:https://sulteng.bps.go.id/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html)

Kabupaten Tojo Una-Una sebelumnya merupakan bagian Kabupaten Poso yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 bersamaan dengan 24 kabupaten lainnya di mekarkan saat itu. Kabupaten Tojo Una-Una awalnya memiliki 8 kecamatan yang membawahi 6 kelurahan, 94 desa definitif 16 desa persiapan dan 2 desa yang berstatus UPT. Sejak tahun 2005 terjadi pemekaran kecamatan sehingga kecamatan keseluruhan menjadi 9 dengan 6 kelurahan serta 111 desa dan 2 UPT (https://sulteng.bpk.go.id/profil-kabupaten-tojo-una-una/).

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5.721,51 km2 atau 572.151 Ha dan luas laut 3.566,21 km2, dengan panjang pantai + 951,115 km yang mana wilayah daratan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yakni Kecamatan Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ampana Tete. Wilayah kepulauan terdiri dari 4 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Una – Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar.

Topografi dari wilayah Kabupaten Tojo Una–una umumnya adalah pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya

berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Tojo Una–una dipengaruhi oleh dua musim yang tetap, yakni Musim Barat dan Musim Timur dengan iklim tropis, curah hujan berkisar 1.200-4.100 mm/tahun dan temperaturnya berkisar 17–33 °C, sedangkan kelembaban udara antara 74% - 82% dan kecepatan angin berkisar 3-6 knot. Sungai–sungai besar yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Tojo Una–una antara lain Sungai Balingara di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Banggai dan Sungai Malei di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Poso.Kabupaten Tojo Una-Una memiliki batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini, dan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia dan Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara
- Sebelah Barat berbatasana dengan Kabupaten Poso

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una, secara umum pada periode Maret 2011 – Maret 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2018 dan Maret 2021 dimana terjadi kenaikan persentase penduduk miskin. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada Gambar 2 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una, 2022).

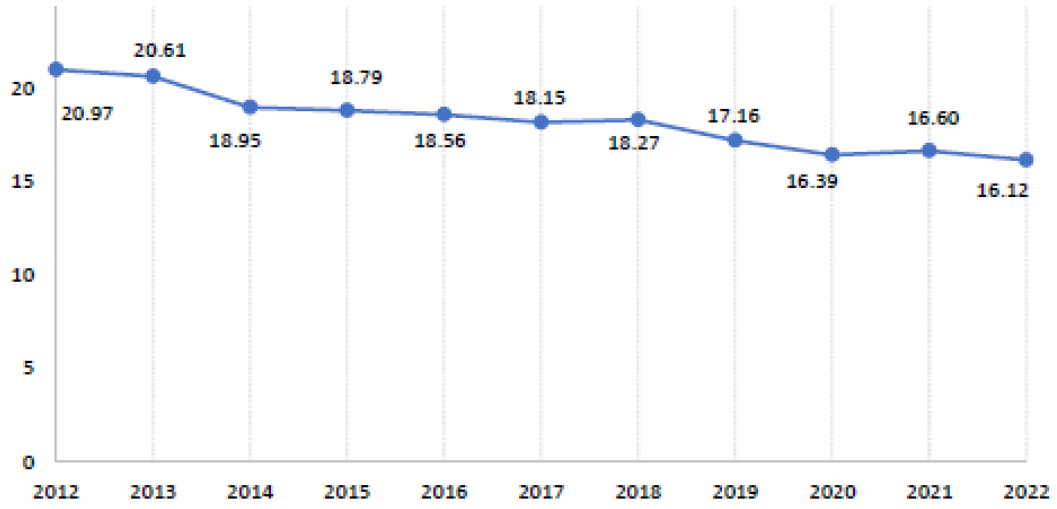

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tojo Una-Una, Maret 2012 – Maret 2022

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 16,12 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2021 yaitu sebesar 16,60 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 25,33 ribu orang. Mengalami penurunan 0,53 ribu orang dari Maret 2021 sebesar 25,86 ribu orang. Garis kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp 547.910,- perkapita/bulan. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada Maret 2021 yaitu Rp 521.434,- perkapita/bulan. Tingkat kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,45 poin. Maret 2021 dari 3,25 turun menjadi 2,80 pada Maret 2022. Tingkat keparahan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,17 poin terhadap tahun sebelumnya. Pada Maret 2021 angka keparahan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 0,95 sedangkan pada Maret 2022 turun menjadi 0,78.

BAB III HASIL PENELITIAN SDGS TAHAP 1

Hasil penelitian SDGs tahap pertama adalah kondisi umum capaian kinerja pemerintah kabupaten Tojo Una-Una, berikut capaian kinerja pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan 4 pilar SDGs.

3.1 Pilar Sosial

3.1.1 Goals 1 (Menghapus Kemiskinan)

1) **Indikator 1.21* (Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan)**

Berdasarkan informasi dari metadata SDGs edisi II (Kementarian PPN. 2020), dapat disimpulkan bahwa target 1.2 yang ditetapkan untuk tahun 2030 adalah mengurangi setidaknya setengah proporsi individu laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai kelompok umur yang tinggal dalam kondisi kemiskinan di semua aspek, sesuai dengan definisi nasional yang berlaku. Indikator 1.2.1* dalam rangka mencapai Goal 1 SDGs menetapkan tujuan untuk memastikan penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan kelompok usia. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun kebutuhan lainnya (yang diukur melalui tingkat pengeluaran). Dengan memadukan status kemiskinan dengan status pekerjaan, konsep pekerja miskin dapat dijelaskan, dengan tujuan mengukur jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam kondisi kemiskinan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh (BPS, 2017), perkembangan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah selama periode 2013-2017 terus meningkat secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan dalam persentase. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 420,52 ribu jiwa (14,45%), sementara pada bulan September 2016, jumlahnya turun menjadi 413,15 ribu jiwa (14,09%). Pada bulan Maret 2017, terjadi peningkatan sebanyak 4,72 ribu jiwa, mencapai 417,87 ribu jiwa (14,4%). Peningkatan ini diduga dipengaruhi oleh laju inflasi yang tinggi, yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pangan seperti beras, cabe, rawit, gula pasir, cakalang, dan rokok kretek filter pada Maret 2017 dibandingkan dengan September 2016. Komoditi-komoditi ini sangat vital dalam konsumsi dasar pangan, sehingga berpengaruh terhadap garis kemiskinan pada Maret 2017.

Sementara itu, pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan mencapai 403,74 ribu orang (13,06%), menunjukkan penurunan sekitar 1,34% dibandingkan dengan bulan Maret 2017. Pada tahun 2017, persentasenya sekitar 14,4%, mengalami penurunan sekitar 1,22% atau sekitar 12,92%. Persentase ini masih tinggi. Proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh dari target, dengan tingkat kemiskinan sekitar 9,34%. Artinya, proyeksi capaian masih berada dalam kategori D atau di bawah 75%.

Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan tingkat kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pada tahun 2017, persentase kemiskinan di Tojo Una-Una sekitar 18,25%, mengalami penurunan sekitar 1,76% atau sekitar 16,39% pada tahun 2020. Pada tahun 2022, persentasenya sebesar 16.12% terjadi penurunan sekitar 0.27% jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2020. Namun, proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una masih sangat jauh dari target penghapusan kemiskinan (Kategori E). Sementara itu, Kabupaten Poso dan Parigi Moutong juga masih berada dalam kategori D terkait pencapaian target kemiskinan pada tahun 2030.

2) Indikator 1.2.2* (Persentase Kesehatan Imunisasi Dasar)

Dalam metadata edisi 11, indikator 1.2.2 menunjukkan presentase individu lakilaki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai kelompok usia yang mengalami kehidupan dalam kondisi kemiskinan, sesuai dengan definisi nasional. Evaluasi kemiskinan dilakukan melalui analisis tiga dimensi, mencakup kekurangan atau ketidakmampuan dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar kehidupan. Dimensi-dimensi tersebut terutama mencakup kesehatan (dengan tiga indikator), pendidikan (dengan dua indikator), dan standar hidup (dengan delapan indikator).

2.a Dimensi Kesehatan

a) Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Berdasarkan informasi dalam metadata SDGs edisi II, tinjauan terhadap aspek kesehatan mencakup imunisasi dasar, status gizi, dan indikator morbilitas, yang mencerminkan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Hidayat (2008) menyatakan bahwa imunisasi merupakan langkah untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh bayi dan anak, bertujuan agar tubuh memiliki zat anti yang meningkatkan kekebalan dan mampu

mencegah masuknya penyakit tertentu. Guna meningkatkan kesehatan anak agar menjadi generasi yang kuat dan sehat, pemerintah mewajibkan setiap anak menerima imunisasi dasar lengkap (IDL) guna mengurangi tingkat kematian akibat penyakit tertentu. Mulai tahun 2017 hingga 2020, Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencapai sasaran pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dengan pencapaian mencapai lebih dari 90%, walaupun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2020.

Berdasarkan estimasi prestasi, Kabupaten Tojo Una-Una diproyeksikan mampu mencapai klasifikasi B, sejajar dengan Kabupaten Poso pada tahun 2024 dan 2030. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dan inovasi program di bidang kesehatan, terutama dalam mencapai IDL oleh Kabupaten Tojo Una-Una, telah terbukti efektif; hanya diperlukan peningkatan minor untuk mencapai target 90% pada tahun 2024 dan 2030.

b) Gizi Masyarakat

Informasi mengenai status gizi balita usia 0-59 bulan berdasarkan indeks gizi kurang (BB/U), balita pendek (TB/U), dan balita kurus (BB/TB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Dari empat kabupaten yang menjadi fokus penelitian di kawasan Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una menonjol sebagai kabupaten dengan persentase tertinggi pada semua indeks status gizi balita jika dibandingkan dengan Kabupaten Banggai, Poso, dan Parigi Moutong. Situasi ini masih berlangsung pada tahun 2021. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih intensif dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengurangi indeks gizi kurang, pendek, dan kurus pada balita, sesuai dengan target nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, data kematian bayi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una memiliki persentase kematian bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso. Fakta ini juga menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan upaya pemenuhan gizi bagi generasi muda.

c) Morbilitas

Morbilitas atau tingkat kesakitan merujuk pada proporsi penduduk yang mengalami masalah kesehatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti terganggunya pekerjaan, sekolah, atau aktivitas normal lainnya. Kesulitan tersebut dapat melibatkan hambatan dalam melakukan kegiatan seperti bekerja, bersekolah, atau menjalani aktivitas harian dengan cara yang biasanya dilakukan.

Prevalensi penyakit menular di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di empat kabupaten yang menjadi fokus penelitian, telah menjadi permasalahan signifikan. Penyakit-penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, kusta, ISPA, diare, dan berbagai penyakit lainnya telah menyumbang pada tingkat kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut.

- **Penyakit TBC**

  Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat bahwa angka penemuan kasus tuberkulosis (TBC) dan kesembuhan pada Tahun 2021 masih belum mencapai target, terutama di empat kabupaten yang menjadi fokus penelitian (Banggai, Tojo Una-Una, Poso, dan Parigi Moutong). Meskipun demikian, terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus dari Tahun 2019 hingga 2020. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga menjelaskan bahwa penurunan kasus TBC ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang secara signifikan memengaruhi upaya penanggulangan penyakit TBC di semua tingkatan, termasuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas kesehatan.

- **Penyakit Kusta**

  Menurut informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, penyakit kusta merupakan bagian dari kategori penyakit tropis yang sering diabaikan. Jika tidak dideteksi dan diobati dengan cepat, penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan. Dampak kecacatan tersebut dapat berdampak merugikan bagi penderita, keluarganya, bahkan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Sejak tahun 2018, kusta telah dianggap sebagai salah satu penyakit prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. Penetapan ini juga diteruskan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2018 mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2019.

  Sejak tahun 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan signifikan dalam prevalensi kusta, bahkan berhasil mencapai target indikator nasional yang ditetapkan di bawah 1/10.000 penduduk, yakni sekitar 0,97/10.000 penduduk. Keadaan ini terus berlanjut hingga tahun 2020, di mana tingkat prevalensi kusta atau angka kesakitan kusta terus menurun mencapai 0,61/10.000 penduduk. Meskipun

demikian, Kabupaten Tojo Una-Una masih menunjukkan angka kesakitan kusta yang melebihi 1/10.000 penduduk, yaitu sebesar 1,03/10.000 penduduk. Pada akhir tahun 2020, terdapat empat kabupaten lainnya yang masih memiliki tingkat kesakitan kusta (prevalensi rate) di atas 1 per 10.000 penduduk, jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya yang berlokasi di kawasan Teluk Tomini.

- **Penyakit HIV/AIDS**

  Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus HIV positif. Pada tahun 2020, dilaporkan adanya 367 kasus HIV. Estimasi jumlah orang dengan risiko terinfeksi pada tahun tersebut mencapai 74.094 orang, dengan 63,89% dari mereka (sebanyak 47.340 orang) telah menerima pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara jumlah kasus HIV pada laki-laki dan perempuan, dengan lebih banyak kasus pada laki-laki. Kasus HIV juga dapat terjadi pada rentang usia yang luas, mulai dari dini hingga tua.

  Analisis data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Banggai mencatat jumlah kasus HIV tertinggi sebanyak 51 kasus, sementara Kabupaten Tojo Una-Una memiliki jumlah kasus terendah hanya sebanyak 13 kasus. Adanya kecenderungan banyaknya kasus AIDS pada kelompok usia produktif, yaitu 20-29 tahun, mencapai 56,5%, sedangkan proporsi terendah terdapat pada kelompok usia 15-19 tahun sebesar 1,5%.

2.b Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan menjadi salah satu penunjuk utama dalam mengukur tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana populasi dapat meraih dampak pembangunan melalui perolehan pendapatan, status kesehatan, aspek pendidikan, dan lainnya.

Diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan secara rutin dipublikasikan melalui laporan tahunan Human Development Report (HDR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbentuk oleh tiga dimensi pokok, yakni 1) Usia panjang dan kehidupan sehat, 2) Pengetahuan, dan 3) Standar hidup yang layak. Dimensi pendidikan, yang mencerminkan perubahan dalam perilaku masyarakat sejalan

dengan peningkatan tingkat pendidikan, mencakup dua indikator utama pada IPM, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perilaku masyarakat terus mengalami perubahan sebagai hasil dari peningkatan pendidikan yang terus-menerus.

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

  Indeks Human Development (HLS) di Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan peningkatan sepanjang periode dari tahun 2017 hingga 2020, sebagaimana yang tercatat dalam Tabel 3.9. Informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pembangunan manusia di wilayah tersebut terus berkembang. Peningkatan ini dapat dilihat dari angka presentase HLS Provinsi Sulawesi Tengah, yang meningkat dari 13,04% pada tahun 2017 menjadi 13,17% pada tahun 2020. Meskipun demikian, proyeksi pencapaian menunjukkan bahwa pada tahun 2030, persentase HLS di Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai target kategori A. Tetapi, diperlukan upaya peningkatan strategi oleh pemerintah Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, dan Poso agar HLS di ketiga kabupaten ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2030.

- **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

  Pertumbuhan Capaian RLS di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mencapai 1,45%, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Analisis pada Tabel 2.10 menunjukkan bahwa proyeksi Capaian RLS di Provinsi Sulawesi Tengah masih mencapai 86,07%, dikategorikan sebagai Kategori C. Hal ini menandakan perlunya penyelidikan lebih mendalam terhadap upaya untuk meningkatkan RLS guna mencapai target yang diinginkan. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Parigi Moutong ternyata masih jauh dari pencapaian target pada tahun 2030, karena proyeksi Capaian RLS hanya mencapai 45,75%, dikategorikan sebagai Kategori E. Sebaliknya, Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso memiliki proyeksi Capaian RLS yang tidak terlalu berbeda jauh dengan Kabupaten Parigi Moutong, masih berada di bawah 75%, yaitu dikategorikan sebagai Kategori D. Artinya, dalam dimensi pendidikan, terutama untuk RLS, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan empat kabupaten di kawasan Teluk Tomini perlu mengimplementasikan upaya dan strategi yang lebih terfokus untuk meningkatkan

Capaian RLS. Hal ini bertujuan agar semua anak usia sekolah di berbagai tingkatan pendidikan dapat mengakses pendidikan formal dengan baik.

2.c Dimensi Standar Hidup

Untuk menilai tingkat kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yang merujuk pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan, bukan sekadar mengukurnya dari aspek pengeluaran. Dimensi standar hidup menjadi gambaran kondisi sehari-hari individu dalam perspektif ini.

- **Tanpa Akses Air Bersih**

  Salah satu sasaran dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di sektor lingkungan hidup adalah memastikan bahwa semua masyarakat memperoleh akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai. Tujuan tersebut bertujuan untuk mencapai akses universal dalam penyediaan air minum dan sanitasi pada tahun 2030. Air minum yang dapat dianggap aman untuk kesehatan adalah air yang memenuhi standar fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih mencakup mereka yang tidak dapat mengakses air minum dari sumber seperti air ledeng/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang dilindungi, dan air hujan (termasuk air kemasan). Hal ini diukur dengan mempertimbangkan jarak minimal 10 meter ke fasilitas jamban atau bahwa akses terhadap air bersih tidak lebih dari 30 menit berjalan kaki dari tempat tinggal.

  Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021, sekitar 93,01% penduduk telah memperoleh akses air bersih baik pada tahun 2020 maupun 2021. Artinya, hanya sekitar 6,9% penduduk yang tidak dapat mengakses air bersih. Situasi ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Poso, di mana hanya 5% memiliki sarana air minum yang terinspeksi kesehatan lingkungan, dan hanya 30% yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Kondisi ini juga menunjukkan tingkat akses air bersih yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, dan Parigi Moutong.

- **Tanpa Sanitasi Layak**

Evaluasi komponen sanitasi dapat diukur melalui persentase rumah tangga yang tidak memiliki toilet yang memenuhi standar. Salah satu langkah untuk mencegah penyakit adalah dengan meningkatkan sanitasi, terutama dalam penggunaan toilet yang sesuai dengan norma kesehatan. Penggunaan toilet yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat secara umum. Selain itu, penggunaan toilet yang memenuhi standar juga menjadi indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta merupakan syarat penting dari fasilitas rumah yang sehat. Toilet yang memenuhi standar sanitasi, seperti dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik/sarana pengolahan air limbah (SPAL), dan digunakan secara individual atau bersama-sama, dianggap sebagai fasilitas sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2021).

Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 menetapkan sasaran mencapai 65% akses kepala keluarga terhadap fasilitas sanitasi yang memadai, seperti Jamban Sehat. Namun, hasilnya melampaui harapan dengan pencapaian sebesar 73,1%, melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun tersebut, jumlah kepala keluarga mencapai 1.675.594, dan ternyata sekitar 1.224.853 KK telah memperoleh akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, setara dengan 73,1%. Cakupan akses kepala keluarga terhadap fasilitas sanitasi yang memadai, yang disebut Jamban Sehat, mencapai tingkat terendah di Kabupaten Tojo Una-Una. Pada tahun 2020, persentasinya sekitar 68,9%, meningkat sedikit menjadi 71,9% pada tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan upaya besar dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk secara signifikan meningkatkan akses sanitasi yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan program penyadaran perilaku terkait penggunaan sanitasi yang memadai di kalangan masyarakat.

3.1.2 Goals 2 (Mengakhiri Kelaparan)

1) **Indikator 2.2.1* (Prevalensi Stunting pada Anak Dibawah 5 Tahun)**

Dari total 17 indikator TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial Goals 2 di Kabupaten Tojo Una-Una, hanya satu indikator yang dapat disusun penilaian pencapaiannya berdasarkan data yang telah terkumpul di Kabupaten Tojo Una-Una. Sebanyak 16 indikator lainnya

belum dapat diidentifikasi karena kurangnya data yang disediakan oleh BPS, yang diperlukan untuk proyeksi yang lebih akurat terhadap pencapaian masing-masing indikator.

No.	Indikator	Nama Indikator	Target Perpres No. 111/2022	Capaian (2018) %	Capaian (2021) %
ADA DATA					
TUJUAN 2: MENGAKHIRI KELAPARAN					
1.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun menjadi 14%, tahun dasar 2019; 27,7% (SSGI, 2019)	26,20	19,60
TIDAK ADA DATA					
TUJUAN 2	2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2*, 2.2.2.(a), 2.2.3, 2.2.1*, 2.3.1.(a), 2.3.2*, 2.4.1, 2.4.1.(a), 2.5.1*, 2.5.2*, 2.a.1*, 2.a.2*, 2.b.1*, 2.c.1*				

Gambar 4.1 Hasil Pemetaan Indikator dan Capaian

Indikator	Nama Indikator	Target Perpres No. 111/2022	Capaian 2017 %	Proyeksi 2024 %	Proyeksi 2024 %	Status Capaian (%)	Kate gori
TUJUAN 2: Menghapus Kelaparan							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan	Menurun menjadi 14%, tahun dasar	26,20	7,78	2,47	>100	A

Gambar 4.2 Kondisi Ketercapaian Indikator 2.2.1

Sumber : Yunginger et al. (2023)

3.1.3 Goals 3 (Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan)

Dari 39 tolok ukur TPB/SDGs di Pilar Pembangunan Sosial Goals 3 Kabupaten Tojo Una-Una, tidak terdapat indikator yang dapat dikenali karena data yang diperlukan untuk proyeksi yang lebih tepat terhadap pencapaian indikator tersebut belum tersedia dari BPS.

3.1.4 Goals 4 (Pendidikan Berkualitas)

1) Indikator 4.1.2*

Sasaran yang tercantum pada poin 4.1. adalah mencapai pada Tahun 2030, memastikan bahwa segala anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya, setara, dan bermutu tinggi, yang menghasilkan pencapaian pembelajaran yang sesuai dan efektif. Di sisi lain, indikator 4.1.2* ini mengevaluasi

proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 4, (b) pada tahap akhir SD/kelas 6, (c) pada tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Indikator ini menilai pencapaian siswa dalam kompetensi dasar akademik, termasuk literasi membaca dan numerasi matematika. Capaian ini mencerminkan mutu pendidikan dasar (SD dan SMP) di Indonesia. Sumber data ini berasal dari data nasional dan provinsi, tetapi tidak diuraikan dalam analisis.

2) Indikator 4.2.1

Indikator ini mengevaluasi tingkat pencapaian dalam menyelesaikan pendidikan tingkat dasar atau setingkatnya, menengah pertama atau setingkatnya, dan menengah atas atau setingkatnya. Dengan menggunakan indikator ini, dapat diukur persentase anak-anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan tahapan pendidikan sesuai dengan rentang usia mereka, terutama pada usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun. Dalam asumsi bahwa siswa belajar secara penuh waktu dan tidak mengalami penundaan kelas, mereka diharapkan lulus dari pendidikan dasar atau setingkatnya pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu, rentang usia yang digunakan untuk menghitung tingkat kelulusan pendidikan dasar atau setingkatnya adalah antara 13 tahun (12 + 1 tahun) hingga 15 tahun (12 + 3 tahun).

Berdasarkan data BPS nasional, terlihat bahwa tingkat penyelesaian pendidikan di SD dari Tahun 2020 hingga 2023 terus meningkat, sebagaimana tercermin pada Gambar 6.22. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan di SD terus meningkat di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, bahkan hampir mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga provinsi tersebut telah berhasil mencapai target 97% dari target SDGs nasional (98%) untuk persentase siswa menyelesaikan pendidikan di tingkat SD.

Sementara tingkat pencapaian pendidikan di SMP di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan, tercatat mencapai lebih dari 90% pada tahun 2020. Sementara itu, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah masih berada dalam rentang 80-88%. Namun, pada jenjang SMA dan setara, terdapat penurunan signifikan di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sekitar 53,73% pada tahun 2022.

3.1.5 Goals 5 (Kesetaraan Gender)

Dari 14 kriteria TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial Goals 5 di Kabupaten Tojo Una-Una, tidak terdapat indikator yang dapat dienidentifikasi karena data yang diperlukan untuk proyeksi yang lebih akurat terhadap pencapaian kriteria-kriteria tersebut belum tersedia dari BPS.

3.2 Pilar Ekonomi

3.2.1 Goals 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)

Pada tujuan ke-7, terdapat dua indikator yang bisa diidentifikasi, yaitu 7.1.1 rasio elektrifikasi dan 7.2.1(b) rasio penggunaan gas rumah tangga.

1) **Indikator 7.1.1* (Rasio Elektrivikasi)**

Dari total 11 kabupaten/kota dan 3 provinsi yang memiliki data terkait, hanya Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Parigi Moutong, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyediakan informasi tersebut. Pada rentang waktu 2017-2021, catatan menunjukkan peningkatan rasio elektrifikasi di setiap Provinsi. Pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi Tengah mencapai rasio elektrifikasi tertinggi, mencapai 97,96%.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2020, pada tahun 2024 diharapkan rasio elektrifikasi mencapai 99,20%. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di setiap Provinsi, baik yang menggunakan listrik PLN maupun listrik non-PLN, telah mendapatkan akses listrik, mendekati angka 100%. Artinya, ketersediaan listrik sudah meluas ke hampir semua bagian Provinsi. Hal ini dapat disimpulkan dari tingginya rasio penggunaan listrik, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Teluk Tomini. Proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan bahwa ketiga Provinsi diprediksi mencapai tingkat ketercapaian 100% atau masuk dalam kategori A. Jika merujuk pada target tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa setiap wilayah memiliki peluang besar untuk mencapai target tersebut.

2) **Indikator 7.2.1(b) (Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga)**

Parameter 7.2.1(b) mengenai rasio penggunaan gas rumah tangga, informasi yang dapat diakses hanya terdapat pada tingkat Provinsi. Bersamaan dengan peningkatan signifikan pada tingkat elektrifikasi, penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2017-2021 masih tergolong rendah dibandingkan dengan dua wilayah lainnya di sekitar Teluk Tomini, mencapai hanya 68,96%.

3.2.2 Goals 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi)

Misi 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah meningkatkan perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peluang pekerjaan yang produktif dan menyeluruh, serta penciptaan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

1) **Indikator 8.1.1* (Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita)**

Laju peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per individu di tiga wilayah yang terletak di sekitar Teluk Tomini, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan selama tiga tahun terakhir, khususnya pada rentang waktu antara tahun 2017 hingga 2019.

2) **Indikator 8.1.1(a) (PDRB Per Kapita)**

PDRB per kapita mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh satu individu dalam satu tahun. Prestasi ini sejalan dengan perbandingan kenaikan PDRB dan jumlah penduduk. Meskipun pertumbuhan PDRB per kapita melambat, tetapi terdapat peningkatan dalam lima tahun terakhir di wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Meski begitu, perekonomian di seluruh wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021, yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 23.3% di Provinsi Sulawesi Tengah.

3) **Indikator 8.2.1* (Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun)**

Indeks ini menunjukkan sejauh mana efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selama periode 2017-2021, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per pekerja di Sulawesi Tengah sangat bervariasi. Tahun 2017 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13.60% di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, prestasi tersebut mengalami kontraksi signifikan, turun menjadi 1.38% di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Seiring pemulihan ekonomi, tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang

bekerja per tahun kembali meningkat, dengan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang mencolok dari 1.38% pada tahun 2020 menjadi 11.09% pada tahun 2021.

4) **Indikator 8.3.1* (Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin)**

Sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor informal (non-pertanian) mengalami fluktuasi dalam pencapaian mereka. Pada rentang waktu 2017 hingga 2019, terdapat penurunan capaian pada indikator ini di Sulawesi Tengah, namun pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang mencolok. Ini bisa terjadi karena selama pandemi, banyak lapangan pekerjaan di sektor informal yang terbentuk karena kemajuan teknologi. Ini juga menciptakan peluang pekerjaan dalam perdagangan online.

5) **Indikator 8.5.1* (Upah rata-rata per jam pekerja)**

Indikator ini memberikan gambaran secara umum tentang kesejahteraan pekerja buruh. Gaji rata-rata per jam pekerja di Provinsi Sulawesi Tengah hanya mengalami satu kali penurunan pada tahun 2018, walaupun tidak signifikan, yakni sekitar Rp 308.00.

6) **Indikator 8.5.2* (Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu parameter yang dipakai untuk mengukur tingkat tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan atau belum terserap oleh pasar kerja. Indikator ini dapat memberikan petunjuk mengenai performa pasar kerja serta mencerminkan kondisi ekonomi khusus, seperti resesi, perubahan dalam siklus bisnis dan teknologi, dan sebagainya. Selama periode 2017 hingga 2022, terlihat bahwa TPT di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang signifikan, melorot dari 3.81% menjadi 3.00%.

7) **Indikator 8.5.2(a) (Persentase setengah pengangguran)**

Proporsi pengangguran setengah di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan signifikan dari 9.10% pada tahun 2020 menjadi 10.53% pada tahun 2021. Kenaikan jumlah pekerja yang berada dalam kategori setengah pengangguran ini dapat diatributkan kepada dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengurangan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor usaha. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa bekerja di bawah standar jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan sejumlah lainnya sedang aktif

mencari atau bersedia menerima pekerjaan. Pertambahan signifikan dalam tingkat pengangguran setengah ini mencerminkan semakin besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

8) **Indikator 8.6.1* (Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET))**

Persentase kaum muda (usia 15-24 tahun) yang tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) di Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dari 21,04% pada tahun 2017 menjadi 22,31% pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan bagi generasi muda dan menyediakan fasilitas untuk memudahkan transisi mereka ke pasar kerja, termasuk perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan.

9) **Indikator 8.7.1(a) (Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur)**

Indikator ini memberikan gambaran mengenai situasi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di luar ketentuan hukum dan peraturan. Provinsi Sulawesi Tengah mencatat pencapaian yang signifikan dengan persentase sebesar 5,12% pada anak usia 10-17 tahun yang bekerja pada tahun 2021.

3.2.3 Goals 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur)

Sasaran 9 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Fokusnya adalah pada pengembangan fasilitas fisik dasar yang penting bagi bisnis dan masyarakat. Sementara itu, industrialisasi diarahkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Inovasi memiliki peran penting dalam memperluas kemampuan teknologi dalam sektor industri dan merangsang pengembangan keterampilan baru. Dari 8 indikator Pilar Ekonomi Tujuan 9 TPB/SDGs yang berada dalam lingkup kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat diidentifikasi bahwa 5 indikator telah tercapai berdasarkan data yang tersedia di BPS.

1) **Indikator 9.1.1(a) (Kondisi mantap jalan nasional)**

Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, pada tahun 2021, sekitar 90% lebih dari total jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dinilai berada dalam kondisi baik dan sedang, menurut laporan.

2) **Indikator 9.1.2* (Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita)**

Momentum pemulihan ekonomi nasional telah memberikan dampak positif terhadap performa industri manufaktur sepanjang tahun 2021. Peningkatan kinerja sektor manufaktur menjadi hal yang krusial karena kontribusinya yang sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Teluk Tomini. Pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi Tengah mencatat pencapaian sebesar 29.11%, menunjukkan peningkatan sebesar 1.93% dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

3) **Indikator 9.2.1(a) (Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur)**

Walaupun terdapat peningkatan dalam kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi industri manufaktur di Kawasan Teluk Tomini tetap tidak stabil, dengan kecenderungan mengalami fluktuasi dan menurun. Sebagian besar daerah di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun. Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya, mencatatkan angka pertumbuhan sebesar -0,28%. Namun, ketika memasuki tahun 2021, terjadi peningkatan pada indikator ini sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi yang mulai terjadi.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam Perpres No 111 tahun 2022 untuk tahun 2024, diperkirakan sebagian besar daerah di Kawasan Teluk Tomini akan mencapai tingkat kategori C dan D. Kabupaten Tojo Una Una, dalam hal pertumbuhan PDB industri manufaktur, diproyeksikan akan mencapai tingkat ketercapaian kurang dari 50% dari target tahun 2024. Sekitar 25% dari proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs Tujuan 9 pada tahun 2024 diperkirakan akan masuk dalam kategori A, sementara 5% proyeksi pencapaian masuk ke dalam kategori B, 15% masuk ke kategori C, 50% masuk ke kategori D, dan sekitar 5% proyeksi pencapaian masuk dalam kategori E. Tingginya presentase pencapaian yang diproyeksikan di bawah 75% (Kategori C, D, dan E) pada tahun 2024 menunjukkan perlunya pemerintah daerah melakukan intervensi lebih lanjut terhadap indikator-indikator tersebut. Ini bertujuan untuk mendorong pencapaian target TPB/SDGs di tahun 2030 dan

mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kawasan Teluk Tomini.

3.2.4 Goals 10 (Berkurangnya Kesenjangan)

Sasaran 10 bertujuan mengurangi disparitas antar wilayah dengan fokus pada mempertahankan penghasilan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari total populasi, mencapai tingkat di atas rata-rata nasional. Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketidaksetaraan yang semakin meningkat, dengan penekanan pada pemberdayaan penduduk berpendapatan terendah. Dalam konteks 12 indikator Pilar Ekonomi Tujuan 10 dari TPB/SDGs yang menjadi tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat 7 indikator yang dapat diidentifikasi mencapai tujuannya berdasarkan data yang tersedia dari BPS.

1) **Indikator 10.1.1* (Rasio Gini)**

Indikator ketidaksetaraan pengeluaran, dikenal sebagai Indeks Gini atau Rasio Gini, digunakan untuk mengukur sejauh mana distribusi pengeluaran bersifat merata. Tujuan utama Rasio Gini adalah mendekati nol, yang menandakan adanya upaya untuk meratakan distribusi pendapatan di antara penduduk.

Prestasi Rasio Gini Provinsi Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, terdapat kecenderungan penurunan dari 0.326 pada tahun 2021 menjadi 0.308 pada bulan Maret 2022, mencerminkan variasi yang berlangsung. Jika kita bandingan dengan rasio gini nasional, rasio gini Provinsi Sulawesi Tengah tetap lebih rendah.

2) **Indikator 10.1.1(a) (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)**

Prinsipnya, pencapaian yang menggambarkan fokus pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan telah menunjukkan dampak positif. Secara keseluruhan, tercatat penurunan tingkat kemiskinan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama rentang waktu 2017 hingga 2019. Meskipun terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, namun hal ini berhasil diperbaiki pada pencapaian tahun 2021 dan 2022.

Pada tahun 2020, data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah Gorontalo, dengan persentase kemiskinan rata-rata sekitar 13.00%

selama periode 2017-2022. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di wilayah ini masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional selama periode yang sama.

3) Indikator 10.2.1* (Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas)

Indikator ini digunakan sebagai ukuran relatif kemiskinan untuk memantau perubahan tingkat kesejahteraan secara proporsional di kalangan penduduk dengan penghasilan kurang dari setengah dari median pendapatan total masyarakat. Mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021, terjadi kecenderungan penurunan proporsi individu yang tinggal di bawah 50 persen dari nilai tengah pendapatan di wilayah Kawasan Teluk Tomini. Semakin rendah angka proporsi tersebut, semakin tinggi peningkatan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh kelompok pendapatan rendah.

Indikator TPB		Level Agregasi	Satuan	Sumber Data	Kondisi Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	**Provinsi Sulawesi Utara**	%	BPS	N/A	14.00	31.01	12.91	12.43
		Provinsi Gorontalo	%	BPS	N/A	27.71	25.51	24.28	20.84
		Provinsi Sulawesi Tengah	%	BPS	N/A	13.99	13.02	12.20	11.39

Sumber : (Arham et al., 2023)

Gambar 4.3 Proporsi Penduduk Yang Hidup Dibawah Median Pendapatan Tahun 2017-2021

4) Indikator 10.3.1(a) (Indeks Kebebasan)

Indeks kebebasan adalah alat pengukur kebebasan sipil, baik individu maupun kelompok, terhadap empat variabel kebebasan utama. Variabel tersebut melibatkan kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Selain itu, indeks ini juga mencerminkan tingkat kesetaraan akses individu atau kelompok dalam partisipasi pemerintahan. Tingkat kebebasan dikelompokkan menjadi tiga kategori: "baik" untuk nilai indeks di atas 80, "sedang" untuk nilai antara 60-80, dan "buruk" untuk nilai di bawah 60. Selama periode 2017-2021, indeks kebebasan mengalami fluktuasi

namun tetap berada dalam kategori baik. Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan indeks kebebasan tertinggi dengan pencapaian di atas 90.00 selama lima tahun terakhir.

3.2.5 Goals 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs dapat terlaksana sepenuhnya dengan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap kemitraan dan kerja sama global. Meskipun bantuan pembangunan resmi dari negara-negara maju mengalami peningkatan signifikan, yakni sekitar 66 persen antara tahun 2000 dan 2014, krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik dan bencana alam tetap menimbulkan kebutuhan mendesak akan bantuan dan sumber daya. Banyak negara juga meminta bantuan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pembangunan. Goal 17 di dalam SDGs memiliki fokus untuk memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks universitas, SDGs memerlukan pendekatan yang holistik dalam melihat kontribusi universitas melalui kolaborasi dengan negara-negara lain, promosi praktik-praktik terbaik, dan penyebarluasan data. Hanya dengan semua mitra bekerja bersama secara komprehensif menuju SDGs, tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai.

Hasil investigasi data menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di seluruh wilayah Teluk Tomini cenderung rendah. Di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, rasio pajak terhadap PDB memiliki kecenderungan untuk tetap stabil. Proyeksi hasil malah menunjukkan gejala kontraksi hingga tahun 2030, menggambarkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap pendapatan transfer sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Ketergantungan ini juga menjadi dasar klasifikasi wilayah Teluk Tomini sebagai kategori E dalam pencapaian indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDB untuk tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Di Tojo Una-Una, rasio pajak terhadap belanja daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Baik pada PERPRES No 111 Tahun 2022 maupun target global, angka tidak tercantum dalam indikator proporsi anggaran domestik yang dibiayai oleh pajak domestik, hanya ditargetkan untuk mengalami peningkatan.

3.3 Pilar Lingkungan

3.3.1 Goals 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak)

Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi bagi semua individu. Terdapat delapan target pencapaian dengan 21 indikator yang terkait dengan Goal 6. Dari keseluruhan indikator tersebut, tujuh di antaranya tidak memiliki data yang tersedia. Ada sembilan indikator yang telah dianalisis, sedangkan lima indikator lainnya belum melalui proses analisis. Indikator yang belum dianalisis melibatkan wilayah disekregasi nasional dan indikator global yang masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan data Lihawa et al. (2023) menunjukkan bahwa pencapaian indikator 6.2.1c dan 6.2.1d di Kabupaten Tojo Una-Una belum terpenuhi. Pada tahun 2020, sekitar 14,83% penduduk Kabupaten Tojo Una-Una masih melakukan praktek pembuangan air besar sembarangan (BABS). Selain itu, capaian pengolahan limbah terpusat di wilayah tersebut mencapai 85,17%, sementara hasil prediksi untuk Tahun 2030 menunjukkan penurunan menjadi 81,67%.

3.3.2 Goals 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada Sasaran 11 bertujuan untuk mencapai kota dan permukiman yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tahan bencana, dan tetap berkelanjutan. Upaya tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan 11 memuat sepuluh sasaran secara global dan 27 petunjuk di tingkat nasional. Dalam penelitian ini, evaluasi pencapaian dilaksanakan untuk lima sasaran dengan menganalisis lima petunjuk yang informasinya dapat diakses. Sementara itu, petunjuk lainnya tidak dianalisis karena terbatasnya data, bahkan beberapa belum tersedia. Berikut adalah hasil pemetaan petunjuk TPB/SDGs di daerah Teluk Tomini berdasarkan ketersediaan data pada Tujuan 11.

Persentase rumah tangga yang memperoleh fasilitas hunian yang memadai mencapai puncaknya di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pencapaian maksimal sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa pencapaian indikator akses hunian yang layak di wilayah tersebut sudah memenuhi standar target nasional.

Tujuan ke-11 hanya memiliki lima indikator yang dapat diidentifikasi, tetapi tidak ada data yang tersedia untuk wilayah kajian, yakni tiga provinsi dan sebelas kabupaten/kota di Kawasan Teluk Tomini. Untuk Indikator 11.1.1.(a), persentase rumah tangga yang memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau di sebelas kabupaten/kota memiliki data lengkap secara teratur dari tahun 2017 hingga tahun dasar 2021. Diketahui bahwa pencapaian rasio rumah tangga yang memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pencapaian indikator ini berada dalam kategori A, mencapai atau mendekati target SDGs sebesar 80 persen.

Berdasarkan PERPRES Nomor 111 Tahun 2020, ditargetkan bahwa pada tahun 2030, sekitar 80% rumah tangga diharapkan memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Dari proyeksi yang telah dilakukan, terlihat bahwa Kabupaten Tojo Una-Una berada pada kategori A dengan tingkat ketercapaian lebih dari 80%. Data ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh wilayah rumah tangga di Teluk Tomini sudah memiliki akses terhadap rumah yang layak huni. Di sisi lain, untuk indikator 11.5.1* yang mencakup jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana, tidak ada proyeksi yang dilakukan karena keterbatasan data dan sifat bencana yang tidak dapat diprediksi.

Indikator 11.6.1.(b) mencatat bahwa persentase pengelolaan sampah hanya dapat ditemukan di tiga wilayah Provinsi, yakni Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah selama periode 2019-2021. Capaian pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah, dengan tingkat sebesar 8,27% pada tahun 2021.

Indikator 11.a.1.(a) menunjukkan bahwa pada Tahun 2021, seluruh daerah di Sulawesi Tengah telah memasukkan KLHS dalam dokumen RTRW mereka, yang mencatat proporsi penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

3.3.3 Goals 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggungjawab)

Pilar tujuan ke-12 terkait lingkungan bertujuan untuk memastikan adanya pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dengan terdapat 23 indikator yang mengukur pencapaian Goals 12.. Ketersediaan data di Pilar Lingkungan, terutama pada goals 12, masih sangat kurang. Hanya ada lima indikator yang dapat diakses, sedangkan enam indikator lainnya belum memiliki data yang tersedia. Selain itu, terdapat 12 indikator yang belum dianalisis, termasuk indikator yang dipecah menjadi tingkat nasional dan indikator global yang masih dalam tahap pengembangan.

Proyeksi pencapaian indikator 12.1.1 dalam merencanakan dan melaksanakan strategi untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa ada dua kategori berdasarkan jenis bahan yang dikonsumsi dan diproduksi, yakni makanan dan non-makanan. Data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan ketersediaan informasi untuk dua Provinsi, yaitu Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa implementasi strategi untuk mencapai pola konsumsi dan produksi dari tahun 2018 hingga 2030 mengindikasikan peningkatan dalam sektor makanan. Sementara itu, sektor non-makanan mengalami pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil proyeksi pencapaian Indikator 12.3.1.(a) terkait persentase sisa makanan yang berasal dari informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK, http://sipsn.menlhk.go.id/ menunjukkan bahwa terdapat satu kota dan lima kabupaten kota yang menyediakan data terkait. Hasil proyeksi pencapaian indikator menunjukkan peningkatan dan penurunan dalam dua kategori wilayah masing-masing, dengan persentase sisa makanan memainkan peran penting dalam proses pengelolaan sampah dan berdampak pada sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan di tingkat nasional.

Proyeksi pencapaian indikator 12.4.2* menunjukkan peningkatan pada dua aspek utama. Pertama, (a) jumlah limbah B3 per kapita meningkat di seluruh wilayah dengan data yang tersedia. Di sisi lain, (b) proporsi limbah B3 yang dikelola dan diolah di enam wilayah menunjukkan tren penurunan pada sektor PEM, manufaktur, dan industri argo, sedangkan sektor prasarana dan jasa mengalami peningkatan. Kenaikan limbah B3 memiliki dampak serius terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan dan pengelolaan yang efektif terhadap limbah B3 sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan di sekitarnya.

3.3.4 Goals 13 (Penanganan Perubahan Iklim)

Salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah penanganan perubahan iklim yang dijelaskan dalam Goal 13. Fokus utamanya adalah mengambil langkah-langkah segera untuk mengatasi dampak perubahan iklim guna mencapai target penanganan perubahan iklim nasional pada tahun 2030. Dampak dari perubahan iklim sudah dirasakan secara global di seluruh dunia, yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini menyebabkan pemanasan global yang mempengaruhi sistem iklim dalam jangka waktu yang lama. Kondisi

Indonesia sebagai negara kepulauan menempatkannya pada tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting dan perlu diimplementasikan melalui kebijakan nasional dan strategi di tingkat nasional dan lokal.

Data untuk mencapai tujuan ke-13 di Kawasan Teluk Tomini belum sepenuhnya dapat diakses. Dari total 8 indikator yang ada, hanya 2 indikator yang dapat diidentifikasi memiliki data yang tersedia. Meskipun demikian, beberapa indikator hanya memiliki data untuk tingkat provinsi. Keberhasilan mencapai Goals 13, terutama pada indikator 13.1.1, sudah sesuai dengan target nasional. Angka kematian akibat bencana saat ini berada di bawah 0,2 per 100.000 penduduk setiap tahun.

Berdasarkan hasil identifikasi data indikator tujuan ke-13, didapati bahwa ada dua indikator yang memiliki data yang tersedia, yaitu jumlah korban yang meninggal, hilang, dan terkena dampak langsung bencana, serta jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah korban yang terdampak bencana, termasuk yang meninggal, hilang, atau mengalami dampak lainnya di tiga Provinsi di kawasan Teluk Tomini, mencapai angka di bawah 0,2 jiwa per 100.000 orang. Ini menunjukkan pencapaian target SDGs sesuai dengan PERPRES No. 11 tahun 2020. Perbandingan data antara tahun 2017 dan 2021 menunjukkan penurunan jumlah korban yang terdampak bencana. Penting untuk dicatat bahwa proyeksi tidak dilakukan pada indikator ini karena data bencana bervariasi tergantung pada kejadian bencana di suatu wilayah.

3.3.5 Goals 14 (Ekosistem Lautan)

Situasi ketersediaan data untuk Goals 14 di Kawasan Teluk Tomini menggambarkan bahwa hanya ada 1 indikator yang tersedia. Ada 6 indikator yang belum terdapat data. Selain itu, terdapat 8 indikator yang belum diolah, meliputi data untuk indikator dengan agregasi wilayah nasional dan indikator global yang akan dikembangkan.

3.3.6 Goals 15 (Ekosistem Daratan)

Misi 15 dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDG) bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan dari ekosistem daratan. Selain itu, misi ini juga fokus pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pemberhentian penggurunan, pemulihan lahan yang mengalami degradasi, dan upaya untuk menghentikan penurunan

keanekaragaman hayati. Terdapat 12 target dan 21 indikator yang mencakup Misi 15 dalam SDG ini.

Indikator 14.b.1(b) di Sulawesi Tengah menunjukkan penurunan, sehingga belum memenuhi target nasional untuk meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil. Dari semua penunjuk yang ada, hanya tiga penunjuk yang diperiksa secara rinci, yaitu penunjuk 15.1.1*, 15.1.2a, dan 15.3.1* yang mewakili pemecahan data tingkat provinsi. Terdapat 18 penunjuk lain yang tidak diselidiki, terdiri dari 10 penunjuk untuk pemecahan data tingkat nasional dan 8 penunjuk global yang telah dikembangkan.

Terjadi peningkatan sebesar 95% dalam proporsi luas kawasan hutan terhadap total luas lahan di Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 63,62% pada Tahun 2020 dari sebelumnya 63,4%. Proporsi ini menunjukkan kestabilan hingga Tahun 2020.

3.4 Pilar Hukum & Tata Kelola

Pilar ini melibatkan usaha dalam mencapai Tujuan 16 dengan menguatkan masyarakat yang bersifat inklusif dan damai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya ini mencakup penyediaan akses keadilan bagi semua orang serta pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

Terdapat 19 indikator yang tidak memiliki data yang sesuai, sementara 2 indikator memiliki data tetapi tidak memiliki target dalam Perpres no.111/2022, sehingga tidak mungkin mengkategorikan tingkat pencapaian indikator tersebut. Dalam proyeksi untuk tahun 2030, hanya 2 indikator yang mendapatkan kategori A, yakni 16.9.1* (Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya tercatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur), dan 16.9.1.(b) (Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk berusia 0-17 tahun).

Perihal ketersediaan data dan kategori proyeksi pencapaian target TPB/SDGs Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kabupaten Tojo Una-Una, hanya ada 2 indikator yang memiliki data tetapi tidak memiliki target dalam Perpres no.111/2022, sehingga pencapaian indikator ini tidak dapat dikategorikan. Sementara itu, 12 indikator lainnya masih belum memiliki data yang tersedia.

3.5 Hasil Pemetaan Kategori Capaian Indikator SDGs Kabupaten Tojo Una-Una

A. Pilar Sosial

Indikator pada pilar sosial dapat terlihat dalam tabel berikut ini. (Yunginger et al., 2023)

Tabel 4.1 Indikator Pilar Sosial

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
1.1.1	Kemiskinan Ekstrim	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020:10,19% (Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Tojo Una-Una	27,30	25,43	23,73	20,54	25	E
1.2.1*	Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020:10,19% (Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Tojo Una-Una	18,15	16,39	18,31	15,12	25,21	E
1.2.2*	KESEHATAN-Imunisasi Dasar berdasarkan data BPS	90%	Tojo Una-Una	66.7	66.6	73.64	71.50	81.83	B
1.2.2*	PENDIDIKAN - Harapan Lama Sekolah	99%	Tojo Una-Una	11.81	12.28	13.12	14.24	89.99	B
1.2.2*	PENDIDIKAN – Rata-rata Lama Sekolah	98%	Tojo Una-Una	7.90	12.28	14.52	20.10	54.41	D

B. Pilar Ekonomi

Berkenaan dengan pilar Ekonomi, tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai indikator yang relevan. (Arham et al., 2023)

Tabel 4.2 Indikator Pilar Ekonomi

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDB per Kapita (%)	-	Tojo Una-Una	7.43	4.31	6.17	6.21	-	C
8.1.1(a)	PDB per Kapita (USD)	Meningkat menjadi USD 5.810 – 6.000	Tojo Una-Una	7.045.78	7.501.92	7.765.94	7.982.63	-	B
9.2.1(a)	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Meningkat menjadi 8.1%	Tojo Una-Una	3,96	0,66	2,21	2,22	-	E
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%)	Menurun menjadi 8.5 – 9.0%	Tojo Una-Una	18,15%	16,60%	14,95%	12,56%		D
17.1.1*	Total Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	Meningkat 11,4 – 12%	Tojo Una-Una	20.34%	17.14%	16.99%	14.54%		A
17.1.1(a)	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB	Meningkat 8,41 – 8,87%	Tojo Una-Una	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%		E

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
17.1.2*	Porporsi anggaran domestic yang didanai pajak domestic	Meningkat	Tojo Una-Una	1.03%	1.05%	1.02%	0.97%		

C. Pilar Lingkungan

Indikator pada elemen Lingkungan dapat disimak pada tabel di bawah ini. (Lihawa et al., 2023)

Tabel 4.3 Indikator Pilar Lingkungan

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
Indikator 6.2.1(c)	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	100%	Tojo Una-Una		96.6%	94.33%	93.66%		B
Indikator 6.2.1(c)	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka	0%	Tojo Una-Una		14,38%	18,64%	17,61%		E
Indikator 6.2.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDT)	100%	Tojo Una-Una		85,17%	80,25%	81,67%		C
Indikator 6.4.2(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya (m^3/detik)	100%	Tojo Una-Una		777	777	777		A
Indikator 11.1.1(a)	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Meningkat menjadi 80%	Tojo Una-Una		88.71%	93.85%	100%		A
Indikator 12.4.2*	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.8 juta ton (kumulatif)	Tojo Una-Una		-	-	-	-	-

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
Indikator 13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Maksimal sebesar 0.2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya	Tojo Una-Una	-	-	-	-	-	-

D. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Ketersediaan data dan kategorisasi proyeksi pencapaian target TPB/SDGs Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan bahwa hanya dua indikator yang memiliki data, tetapi tidak ada target yang ditetapkan dalam Perpres no. 111/2022. Sehingga, kemungkinan pencapaian indikator ini tidak dapat diklasifikasikan. Di sisi lain, untuk 12 indikator lainnya, data belum tersedia.

BAB IV ANALISIS HIERARCHY PROCESS

Menurut Vsaidya & Kumar (2006) *Analytic Hierarchy Process* adalah alat pengambilan keputusan berdasarkan kriteria ganda. Ini adalah pendekatan nilai Eigen untuk perbandingan berpasangan. Ini juga memberikan metodologi untuk mengkalibrasi skala numerik untuk pengukuran kinerja kuantitatif maupun kualitatif. Skala ini berkisar dari 1/9 untuk "kurang bernilai dari", 1 untuk "sama", dan 9 untuk "jauh lebih penting dari", mencakup seluruh spektrum perbandingan. Beberapa langkah kunci dan dasar yang terlibat dalam metodologi ini adalah Vaidya & Kumar (2006) :

1. Sampaikan masalah.
2. Perluas tujuan masalah atau pertimbangkan semua pihak, tujuan, dan hasilnya.
3. Identifikasi kriteria yang memengaruhi perilaku.
4. Strukturkan masalah dalam hierarki berbagai tingkat yang terdiri dari tujuan, kriteria, sub-kriteria, dan alternatif.
5. Bandingkan setiap elemen pada tingkat yang sesuai dan kalibrasi pada skala numerik. Ini memerlukan perbandingan n(n-1)/2, di mana n adalah jumlah elemen dengan pertimbangan bahwa elemen diagonal sama atau 1 dan elemen lainnya akan menjadi reciprok dari perbandingan sebelumnya.
6. Lakukan perhitungan untuk menemukan nilai Eigen maksimum, indeks konsistensi CI, rasio konsistensi CR, dan nilai ter-normalisasi untuk setiap kriteria/alternatif.
7. Jika nilai Eigen maksimum, CI, dan CR memuaskan, maka keputusan diambil berdasarkan nilai ter-normalisasi; jika tidak, prosedur diulang sampai nilai-nilai ini berada dalam rentang yang diinginkan.

4.1 pemetaan prioritas berdasarkan analisis AHP.

Gambar 4.4 Hierarki Pemilihan Keputusan

A. Penyusunan Matriks Perbandingan Berpasangan

Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Berpasangan

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	1.00	2.00	1.00	0.33	4.00
RPJMD	0.50	1.00	1.00	1.00	7.00
Kelembagaan	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
Anggaran	3.00	1.00	1.00	1.00	7.00
Kemitraan	0.25	0.14	0.17	0.14	1.00

B. Penjumlahan Matriks

Setiap nilai Menghitung total nilai dalam setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan sebagaimana diperlihatkan dalam persamaan berikut:

$$n = \sum_{i}^{z} = 0^{x_{ij}}$$

Keterangan :

n = Hasil penjumlahan tiap Kolom

z = Banyaknya alternatif

i = 1, 2, 3, … z

x = nilai tiap cell / gabungan antara kolom dan baris

n = 1 + 0.50 + 1 + 3 + 0.25 = 5.75 .. dst.

Hasil penjumlahan nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan :

Tabel 4.5 Penjumlahan Matriks

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	1.00	0.13	3.00	0.20	0.33
RPJMD	8.00	1.00	8.00	5.00	4.00
Kelembagaan	0.33	0.13	1.00	0.13	0.13
Anggaran	5.00	0.20	8.00	1.00	3.00
Kemitraan	3.00	0.25	8.00	0.33	1.00
n	**5.75**	**5.14**	**4.17**	**3.48**	**25.00**

C. Normalisasi Matriks

Membagi setiap nilai kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks yang ditunjukkan pada persamaan dibawah ini.

$$m = \frac{xij}{n}$$

Keterangan :

m = hasil normalisasi

x = nilai tiap cell /gabungan antara baris dan kolom

n = hasil jumlah tiap kolom

$$m = \frac{1}{5.75} = 0.17 \text{ .. dst.}$$

Hasil penjumlahan nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan:

Tabel 4.6 Normalisasi Matriks

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	0.17	0.39	0.24	0.10	0.16
RPJMD	0.09	0.19	0.24	0.29	0.28
Kelembagaan	0.17	0.19	0.24	0.29	0.24
Anggaran	0.52	0.19	0.24	0.29	0.28
Kemitraan	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04

D. Menghitung Nilai Bobot Prioritas

Menghitung total nilai dari setiap baris dan membagi hasil penjumlahannya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata atau bobot prioritas, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan di bawah ini.

$$bp = \frac{\sum_{j}^{n} = 0x^{ij}}{n}$$

Keterangan :

bp = hasil rata-rata / bobot prioritas

n = banyaknya kriteria

j = 1, 2, 3, … n

x = nilai tiap cell / gabungan antara baris dan kolom

$$bp = \frac{0.17+0.39+0.24+0.10+0.16}{5} = 0.21 \text{ … dst.}$$

Hasil penjumlahan baris dibagi dengan jumlah elemen atau jumlah kriteria mendapatkan Bobot Prioritas.

Tabel 4.7 Bobot Prioritas

Kriteria	Bobot
Regulasi	0.21
RPJMD	0.22
Kelembagaan	0.23
Anggaran	0.30
Kemitraan N	0.04 1

E. Menghitung Nilai Eigen

1. Kalikan nilai setiap sel pada kolom pertama dengan bobot prioritas pertama, kalikan nilai sel pada kolom kedua dengan prioritas kedua, dan lakukan hal serupa untuk sel-sel berikutnya.

   Kolom Regulasi : 1 x 0.06 = 0.06 .. dst.

Tabel 4.8 Perkalian setiap nilai cell dengan bobot prioritas

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	0.21	0.44	0.23	0.10	0.15
RPJMD	0.11	0.22	0.23	0.30	0.27
Kelembagaan	0.21	0.22	0.23	0.30	0.23
Anggaran	0.64	0.22	0.23	0.30	0.27
Kemitraan	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04

2. Jumlahkan hasilnya untuk setiap baris pada matriks.

   Baris Regulasi : 0.21+0.44+0.23+0.10+0.15 =1.13 .. dst.

Tabel 4.9 Hasil Penjumlahan Setiap Baris

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan	Jumlah
Regulasi	0.21	0.44	0.23	0.10	0.15	**1.13**
RPJMD	0.11	0.22	0.23	0.30	0.27	**1.12**
Kelembagaan	0.21	0.22	0.23	0.30	0.23	**1.19**
Anggaran	0.64	0.22	0.23	0.30	0.27	**1.65**
Kemitraan	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	**0.20**

3. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas yang bersangkutan.

   Baris Regulasi = 1.13/0.21 = 5.34… dst.

Tabel 4.10 Hasil Penjumlahan Baris Dibagi Dengan Elemen Prioritas Baris

Kriteria	**Jumlah**	**Bobot Prioritas**	**λ**
Regulasi	1.13	0.21	5.34
RPJMD	1.12	0.22	5.16
Kelembagaan	1.19	0.23	5.25
Anggaran	1.65	0.30	5.43
Kemitraan	0.20	0.04	5.30

4. Jumlahkan hasil lambda dari setiap kriteria, bagi dengan jumlah elemen yang ada, dan hasilnya disebut λmaks sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan berikut

$$\lambda_{maks} = \frac{\sum \lambda}{n}$$

Keterangan :

λmaks = eigen maksimum

n = banyaknya kriteria

$$\lambda maks = \frac{5.34+5.16+5.25+5.43+5.30}{5} = 5.30$$

5. Menghitung Consistensi Ratio (CR)

$$CI = \frac{\lambda_{maks^{-n}}}{n-1}$$

Keterangan :

n = banyak elemen

$$CI = \frac{5.30-5}{5-1} = 0.30$$

6. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan Rasio Konsistensi atau Consistency Ratio (CR) sebagaimana terlihat dalam persamaan di bawah ini.

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Keterangan :

RI = random indeks

CR = rasio konsistensi

Tabel 4.11 Nilai Indeks Random

Ukuran Matriks (N)	**Nilai RI**	**Ukuran Matriks (N)**	**Nilai RI**
1, 2	0	9	1.45
3	0.58	10	1.49
4	0.90	11	1.51
5	1.12	12	1.48
6	1.24	13	1.56
7	1.32	14	1.57
8	1.41	15	1.9

CR = $\frac{0.30}{1.12}$ = 0.07

7. Melakukan evaluasi konsistensi hirarki; jika nilai CR melebihi 0,1, maka penilaian data judgment dianggap tidak konsisten dan perlu diperbaiki. Sebaliknya, jika rasio konsistensi CR kurang dari atau sama dengan 0,1, maka perhitungan data dianggap konsisten dan akurat.

   CR = 0.1 atau ≤ 0.1 maka data konsisten dan akurat.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis AHP yang menunjukkan bahwa Anggaran dan Kelembagaan memiliki prioritas tertinggi dengan bobot masing-masing 0.30 dan 0.23, maka rekomendasi untuk tindak lanjut pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

- Penguatan Pengelolaan Anggaran: Fokus utama harus diberikan pada pengelolaan anggaran secara efisien dan transparan. Langkah-langkah seperti pengoptimalan alokasi anggaran, pemantauan pengeluaran, dan evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran perlu diimplementasikan. Ini akan membantu memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
- Reformasi Kelembagaan: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus memperkuat kelembagaan dalam segi manajemen dan administrasi. Ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, peningkatan prosedur kerja yang efisien, dan pembaruan kebijakan yang relevan.

Dengan memperbaiki kelembagaan, pemerintah akan mampu memberikan layanan publik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Implementasikan sistem yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja program dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini akan membantu memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai secara efisien dan hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan rencana.
- Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan adalah langkah penting. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan kelembagaan dengan lebih efektif. Pelatihan tersebut dapat meliputi bidang manajemen keuangan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan teknik evaluasi kinerja.

BAB V IMPORTANT PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Analisis IPA dilakukan dengan maksud mengukur korelasi antara persepsi dan peningkatan kualitas suatu produk atau layanan. Hasilnya disajikan dalam bentuk grafik yang dikenal sebagai analisis kuadran (T.M. & A.M., 2000). Pentingnya analisis kinerja (IPA) diperkenalkan oleh Martila dan James pada tahun 1977, seperti yang dijelaskan oleh Magak dan Levenburg dalam Budi Setiawan Santoso dan Muhammad Fauzi Anwar (2015). Dalam penerapannya, IPA menggunakan tiga jenis analisis, yaitu evaluasi tingkat kesesuaian pertanyaan, analisis kesenjangan tingkat kesesuaian, dan analisis kuadran (Septa et al., 2020).

Hasil dari pengukuran menggunakan metode ini akan disajikan dalam grafik yang terdiri dari empat bagian, di mana sumbu X mencerminkan kinerja (performance) dan sumbu Y mencerminkan tingkat kepentingan (importance) (Martilla & James, 1977). Menurut Wicaksono et al., (2012) *Importance Performance Analysis* (IPA) disajikan dalam format matriks empat kuadran. Matriks kepentingan dan kinerja membagi bidang kartesian menjadi empat kuadran, yaitu:

1. Kuadran I terletak di bagian kiri atas (atribut yang perlu ditingkatkan).
2. Kuadran II terletak di bagian kanan atas (mempertahankan kinerja).
3. Kuadran III terletak di bagian kiri bawah (atribut yang perlu dipertahankan).
4. Kuadran IV terletak di bagian kanan bawah (prioritas utama).

5.1 Pemetaan Prioritas Menggunakan Importance Performance Analysis (IPA)

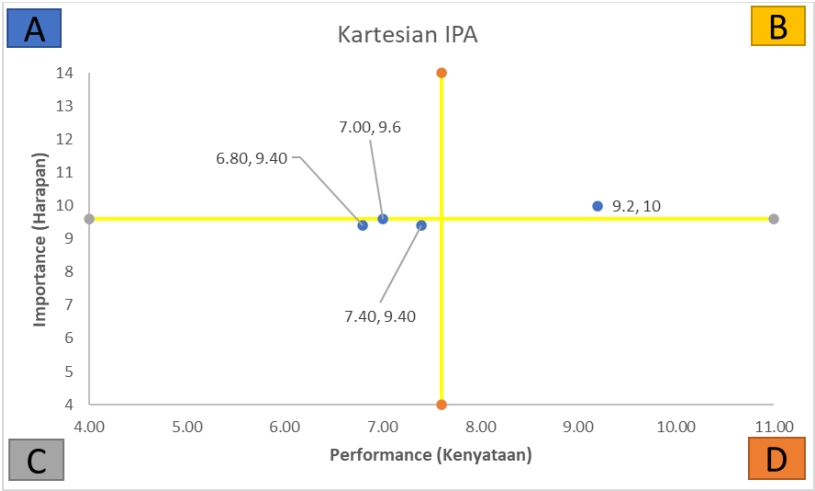

Gambar 4.5 Diagram Kartesian

Pada diagram kartesius (Gambar 4.5), terlihat nilai rata-rata tingkat kepentingan terhadap posisi kuadran kartesius dimensi pemerintah kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

1. Kuadran A

   Kuadran A mengindikasikan dimensi-dimensi yang dianggap sangat relevan oleh pelanggan, namun implementasinya dinilai kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan para responden.

2. Kuadran B

   Sementara pada kuadran B, para responden menilai dimensi-dimensi di dalamnya sangat penting dan memuaskan, sehingga dianggap perlu untuk dipertahankan. Dimensi yang berada pada kuadran ini yakni (4) Peningkatan Pajak Daerah (9.20 – 10)

3. Kuadran C

   Kuadran C menampilkan beberapa dimensi yang dianggap kurang penting dan tidak memuaskan, sehingga responden meresponsnya dengan sikap yang biasa-biasa saja. Beberapa dimensi tersebut ialah

   a. (1) Pengurangan tingkat kemiskinan (7.00 – 9.6)
   b. (2) Peningkatan cakupan imunisasi dasar (7.40 – 9.40)
   c. (3) Pengurangan ketimpangan / gini ratio (6.80 – 9.40)

4. Kuadran D

   Pada kuadran terakhir, yakni kuadran D, dimensi-dimensi tersebut dianggap kurang penting, namun kinerjanya sangat memuaskan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA) dengan menggunakan analisis kuadran maka rekomendasi untuk tindak lanjut pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan Kualitas Pajak Daerah (Kuadran B):

  Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una perlu terus memperkuat strategi dan kebijakan yang telah berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Ini mungkin melibatkan

peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran pajak, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

- Perbaikan Kinerja dalam Aspek Penting tetapi Kurang Berdampak (Kuadran C):

Meskipun kinerja dalam aspek-aspek seperti mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan cakupan imunisasi dasar, dan mengurangi ketimpangan/gini ratio dianggap memiliki dampak yang rendah, pemerintah masih harus memperhatikan aspek-aspek ini. Dalam rangka meningkatkan kinerja, langkah-langkah konkret seperti meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, meluncurkan program-program bantuan sosial yang lebih efektif, dan memperkuat kerjasama antarlembaga untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan.

- Evaluasi Kebijakan dan Program yang Ada:

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program yang ada dalam aspek-aspek yang termasuk dalam Kuadran C. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kinerja rendah dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan dampak positif dari kebijakan dan program tersebut.

- Konsultasi dengan Pihak Terkait:

Keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat, dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pada aspek-aspek yang masuk dalam Kuadran C penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas tindakan yang diambil.

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bobot prioritas pada aspek-aspek yang dibuat menggunakan metode AHP, maka penentuan prioritas yang dihasilkan lebih objektif sehingga Anggaran dan Kelembagaan menjadi prioritas dengan bobot masing-masing yakni 0.30 dan 0.23.
2. Hasil dari metode IPA dengan menggunakan analisis kuadran yakni :
   a. Kuadran B sebagai kualitas yang harus tetap dipertahankan dikarenakan kepentingan dan kinerjanya sama-sama tinggi, yaitu mengenai meningkatkan pajak daerah.
   b. Kuadran C dikatakan kuadran ini memiliki tingkat kinerja dan kepentingannya sama-sama rendah maka bisa dikatakan kinerja dari pada pemerintah kabupaten Tojo Una-Una tidak begitu mempengaruhi kepentingan, yaitu mengurangi Tingkat kemiskinan; meningkatkan cakupan imunisasi dasar; dan mengurangi ketimpangan/gini ratio.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa simpulan penting yang dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis ke depan:

1. Prioritaskan Anggaran dan Kelembagaan: Dengan bobot prioritas masing-masing 0.30 dan 0.23 menurut metode AHP, Anggaran dan Kelembagaan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan fokus khusus dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kelembagaan, karena kedua aspek ini menjadi landasan bagi berbagai kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Misalnya dengan melakukan :
   A) Peningkatan Transparansi Anggaran: Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti laporan keuangan yang terbuka dan jelas.
   B) Penguatan Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah melalui pelatihan dan pengembangan SDM, serta pembenahan struktur organisasi yang efisien dan efektif.

2. Pertahankan Kualitas Pajak Daerah (Kuadran B): Kuadran B, yang menunjukkan kualitas yang harus tetap dipertahankan, menggarisbawahi pentingnya menjaga dan meningkatkan kinerja pajak daerah. Kinerja yang tinggi dalam hal ini menunjukkan potensi yang signifikan untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una disarankan untuk terus memperkuat sistem perpajakan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Misalnya dengan melaksanakan :
   A) **Sosialisasi Pajak**: Melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
   B) **Peningkatan Layanan Pajak:** Meningkatkan kualitas layanan perpajakan, seperti menyederhanakan prosedur pembayaran pajak, memberikan layanan yang ramah dan efisien kepada wajib pajak, dan memperkenalkan sistem pembayaran pajak online

3. Perhatikan Kuadran C: Kuadran C menunjukkan bahwa meskipun tingkat kinerja dan kepentingannya sama-sama rendah, masih ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan, seperti mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan cakupan imunisasi dasar, dan mengurangi ketimpangan. Meskipun dampak langsungnya mungkin terlihat rendah, upaya dalam memperbaiki aspek-aspek ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una disarankan untuk tidak mengabaikan aspek-aspek ini dan mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dalam bidang-bidang tersebut. Misalnya dengan melaksanakan :
   A) **Program Penanggulangan Kemiskinan:** Melakukan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, dan pembangunan infrastruktur sosial di daerah-daerah terpencil.
   B) **Peningkatan Akses Kesehatan:** Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk meningkatkan cakupan imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pembangunan puskesmas atau klinik kesehatan di daerah-daerah yang belum terjangkau dengan baik.

C) **Program Pengentasan Ketimpangan:** Melakukan program-program untuk mengurangi ketimpangan, seperti program bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok rentan, dan program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arham, M. A., Payu, B. R., Tantawi, R., Kusuma, C. A., Panigoro, N., & Toralawe, Y. (2023). *Potret Awal Pencapaian SDGs Pilar Ekonomi Di Kawasan Teluk Tomini* (T. Media (ed.); 1st ed., Vol. 01). Tahta Media.

Lihawa, F., Koniyo, Y., Arifin, S. S., Mahmud, M., Maryati, S., Juliana, Koniyo, H., Syukri, M. R., & Masruroh. (2023). *PILAR LINGKUNGAN DI KAWASAN TELUK TOMINI : Potret Awal Pencapaian SDGs* (1st ed.).

Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis. *Journal of Marketing*, *41*, 77–79. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1250495

Septa, F., Yudhana, A., & Fadlil, A. (2020). Analisis Perbandingan Metode Regresi Linier Dan Importance Performance Analysis (IPA) Terhadap Kepuasan Pengguna Pada Layanan E-Government Menggunakan Metode WebQual Modifikasi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *7*(5), 951–960. https://doi.org/10.25126/jtiik.2020752294

T.M., L., & A.M., E. (2000). *Review of satisfaction research and measurement approaches. Science and Research Internal Report*. Departement of Conservation.

Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of Operational Research*, *169*(1), 1–29. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028

Wicaksono, B. L., Susanto, A., & Winarno, W. W. (2012). Evaluasi Kualitas Layanan Website Pusdiklat BPK RI Menggunakan Metode WebQual Modifikasi Dan Importance Performance Analysis. *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, *19*(1), 21–34.

Yunginger, R., Kandowangko, N. Y., Supu, I., Supartin, Amali, L. N., Amalia, L., Papeo, D. R. P., & Dama, M. (2023). *Portret Awal Pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial Di Kawasan Teluk Tomini* (T. Media (ed.); 1st ed.). Cv. Tahta Media Group.